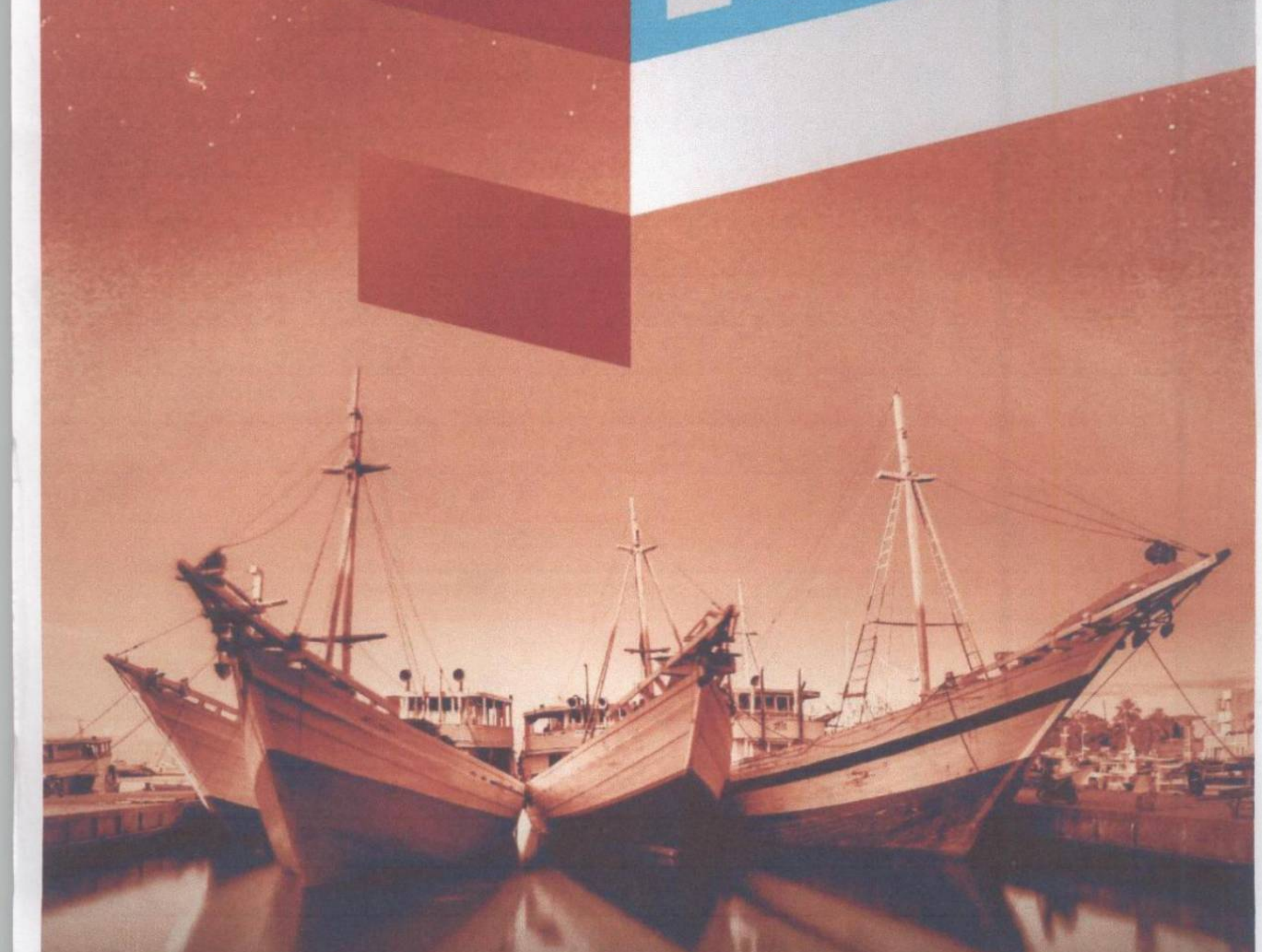
PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENJA 2026

RENCANA KERJA



BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

#MenujuMakassarMULIA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1847/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 12)
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1847/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Paanakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Renja BRIDA Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi di Kota Makassar. Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029, yang menjadikan tahun 2026 sebagai salah satu tahapan awal implementasi visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen BRIDA Kota Makassar dalam mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi, mendorong kolaborasi multipihak, serta menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan internal perangkat daerah, tetapi juga sebagai instrumen sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari masukan, dukungan, dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran BRIDA Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Makassar, 3 September 2025

PLT. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BALITBANGDA

H. Haidil Adha, S.Sos, M.M

Nip. 19700216 1999803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BRIDA Kota Makassar 38

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BRIDA Kota Makassar 42

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 43

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 52

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar 53

3.2 Program dan Kegiatan 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 62

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BRIDA Kota Makassar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024..... 24

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar..... 40

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 44

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Makassar 51

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027..... 56

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan patokan untuk mempermudah tercapainya tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Makassar melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan. Dokumen tersebut disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 1). Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, 2). Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, 3). Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, 4). Pelaksanaan Forum PD, 5). Perumusan Rancangan Akhir Renja PD, 6). Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8), Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional berimplikasi pada dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan BRIN.

Rencana Kerja BRIDA disusun dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Renja BRIDA memiliki keterkaitan erat dengan Renja Kementerian/Lembaga, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai instansi pembina, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan riset dan inovasi di daerah sejalan dengan prioritas riset dan inovasi nasional. Selanjutnya, Renja BRIDA juga diharmonisasikan dengan Renja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkesinambungan, melalui pemanfaatan hasil riset dan penguatan ekosistem inovasi pada berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, Renja BRIDA berperan strategis sebagai instrumen perencanaan yang menghubungkan agenda riset dan inovasi nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus memastikan adanya sinergi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program.

Renja BRIDA Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada akhirnya bermuara pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Dengan demikian, Renja BRIDA berperan strategis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan riset serta inovasi yang dirumuskan tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, tetapi juga terintegrasi dalam siklus penganggaran daerah secara efektif dan berkesinambungan. Dokumen RENJA ini juga sebagai dokumen RENJA periode RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang- Undang Nomor 134 Tahun 2025 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435).
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 52);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota

Makassar Tahun 2026. (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025).

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar adalah :

1. Untuk merumuskan rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029.
2. Untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi pada perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas pembangunan daerah pada BRIDA Kota Makassar.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan, secara umum dan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi yang terakomodir pada BRIDA Kota Makassar.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja pada BRIDA Kota Makassar setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari beberapa sub Bab yang menjelaskan tentang beberapa hal seperti latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

verifikasi

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BRIDA tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Balibangda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BRIDA tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada hasil laporan hasil kinerja tahunan BRIDA atau realisasi APBD BRIDA.

Berisikan kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan BRIDAberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK.

tingkat kinerja pelayanan BRIDA, permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BRIDA, beberapa poin mengenai isu-isu strategis yang terdapat pada BRIDA. Diantaranya adalah permasalahan yang dihadapi, peluang / *opportunity* di tahun 2026, dan ancaman yang harus diantisipasi di tahun 2026.

hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2026 yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan di BRIDA.

penelaahan usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang didapatkan melalui Musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini berisi tentang Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BRIDA, berisi tentang keterkaitan antara tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kota Makassar yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra BRIDA, Bagian ini juga berisi tentang rincian rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, target capaian kinerja, kebutuhan dana yang ada pada BRIDA untuk tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kondisi rumusan Rencana Kerja dan Program BRIDA Tahun

2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan beberapa kaidah untuk memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Renja BRIDA Tahun 2026 dan rencana tindak lanjut BRIDA sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2024 yang kini bertrasnformasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan perkiraan capaian tahun 2025, serta realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi keuangan Perangkat Daerah, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Reviu yang dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2024, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BALITBANGDA Kota Makassar Tahun 2024

Secara Keseluruhan, baik tingkat capaian kinerja atau realisasi anggaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerag Daerah Tahun 2024 memiliki predikat kinerja **tinggi**. Tingkat capaian kinerja BRIDA tercatat pada angka 85,42%. Adapun kondisi keuangan adalah sebesar Rp.7.483.309.942,- dengan realisasi sebesar Rp.6.722.699.299,- atau sebesar 89,84%. Alokasi belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2024 sebesar Rp.5.947.667.732,- atau sebesar (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.5.418.405.362,- (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 91,10%.

Adapun alokasi belanja untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 1.535.642.210,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.304.293.937,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupaih). Predikat kinerja keuangan untuk program ini juga tinggi yaitu sebesar 84,93%. Pencapaian-pencapaian tersebut, didukung oleh pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang terjabarkan secara spesifik sebagai berikut :

A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)* :

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. yang terbagi menjadi 3 (Tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 477.702.330,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 383.546.900,- atau sebesar 80,29 %. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.373.400,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 82,92 % dengan realisasi kinerja 100%.

1. 2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.144.200,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 71,53 % dengan realisasi kinerja 100%.

1. 3. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

verifikasi

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.029.300,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 83,10 % dengan realisasi kinerja 100%.

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 363.070.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 329.547.475,- atau sebesar 90,77 %. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)* :

2.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.070.645,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,05% dengan realisasi kinerja 100%;

2.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.156.030,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 90,90% dengan realisasi kinerja 100%;

2.3 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.320.800,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 90,27% dengan realisasi kinerja 100%;

3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terbagi menjadi 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.268.469.492,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.232.970.849,- atau sebesar 86,78%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

3.1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.103.955.525,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,30% dengan realisasi kinerja 100%;

3.2. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.129.015.324,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 83,45 % dengan realisasi kinerja 100%;

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.426.400.188,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.358.228.713 atau sebesar 84,01% dengan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

4.1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.622.234,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 83,11% dengan realisasi kinerja 100%;

4.2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.756.536,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 87,23% dengan realisasi kinerja 100%;

4.3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.849.943,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 83 % dengan realisasi kinerja 100%;

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 7 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 81.679.600,- dan realisasi kinerja sebesar Rp. 54.450.200,- atau sebesar 66,66 % Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.468.200,- atau dengan persentase serapan anggaran

verifikasi

sebesar 35,97% dengan realisasi kinerja 100 %;

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.918.300,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 92,57% dengan realisasi kinerja 100%;

1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.936.300,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 78,77 % dengan realisasi kinerja 100%;

1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.544.900,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100 % dengan realisasi kinerja 100%;

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.601.900,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,87 % dengan realisasi kinerja 100%;

1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.568.100,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,33% dengan realisasi kinerja 100 %;

1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.412.500,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 67,43 % dengan realisasi kinerja 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.471.377.406,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.233.425.932,- atau sebesar 94,68%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.849.198.032,- atau dengan

verifikasi

persentase serapan anggaran sebesar 95 % dengan realisasi kinerja 100%;

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.207.600.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 93,77% dengan realisasi kinerja 100%;

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.159.976.100,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,37% dengan realisasi kinerja 100%;

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.958.500,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 86,11% dengan realisasi kinerja 100%;

2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.693.300.000,-. atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,60% dengan realisasi kinerja 100%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 383.858.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.331.779.584,- atau sebesar 86,43%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.331.779.584,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 86,43 % dengan realisasi kinerja 100%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.514.975.796,- dan realisasi kinerja sebesar Rp.423.915.750,- atau sebesar 82,32%. Adapun realisasi anggaran dan

kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.466.000-. atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 74,49% dengan realisasi kinerja 100%;

4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.280.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 87,21% dengan realisasi kinerja 100%;

4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.310.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 90,40% dengan realisasi kinerja 100%;

4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.111.100.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 82,42% dengan realisasi kinerja 100%;

4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.270.759.750,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 81,55% dengan realisasi kinerja 100%.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.179.666.080,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.112.365.696,- atau sebesar 62,54%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.990.796,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 69,21% dengan realisasi kinerja 100%;

verifikasi

5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.596.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 56,93% dengan realisasi kinerja 50%;

5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.805.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 60,92% dengan realisasi kinerja 100%.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.316.110.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 262.468.200,- atau sebesar 83,03%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut *(sumber : Tabel E.81 Tahun 2024)*:

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.392.200,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 82,00% dengan realisasi kinerja 100%;

6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.119.980.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 75,02% dengan realisasi kinerja 100%;

6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.396.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 75,33% dengan realisasi kinerja 90%;

6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.95.700.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,65% dengan realisasi kinerja 100%,-

verifikasi

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Kota Makassar Tahun 2025 (Triwulan I)

Rencana Kerja BRIDA pada tahun 2025 mencakup 2 program, 10 kegiatan, dan 38 sub kegiatan. Program tersebut terdiri atas 1 program utama dan 1 program penunjang. Jumlah anggaran BRIDA pada tahun ini adalah sebesar **Rp. 10.575.936.007,-,-**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk program utama, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar **Rp.203.139.750**,- atau sebesar 7,05% dan tingkat capaian kinerja sebesar 16,26%. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp.1.169.685.518,-** atau sebesar 15,20% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 23,15%.

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran BRIDA Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.372.825.268,-** atau sebesar **12,98%** dan **13,33%** realisasi kinerja. Berikut ini diuraikan secara terperinci program dan kegiatan yang termuat dalam Renja BRIDA Kota Makassar Tahun 2024.

A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, terdiri atas 4 kegiatan sebagai berikut:

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.774.999.300,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.119.153.055,- Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.753.055,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 13,36% dengan realisasi kinerja 00,00%.

1.2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.700.000,- atau dengan

verifikasi

persentase serapan anggaran sebesar 15,56% dengan realisasi kinerja 00,00%.

1.3 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.700.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 18,89% dengan realisasi kinerja 00,00%.

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 738.177.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.404.585,-Adapun Realisasi anggaran maupun kinerja untuk sub-sub kegiatan sebagai berikut:

2. 1. Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.257.165,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 8,97% dan realisasi kinerja 00,00%.

2. 2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.733.055,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 3,11% dan realisasi kinerja 00,00%.

2. 3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.414.365,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 9,28% dan realisasi kinerja 00,00%.

3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terbagi menjadi 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 502.674.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.082.110,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

3. 1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 0% dan realisasi kinerja 0%.

verifikasi

3. 2. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.082.110,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 6,92% dan dengan realisasi kinerja 00,00%.

4) **Pengembangan Inovasi dan Teknologi,** yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 864.734.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

4. 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0%;

4. 2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 5,61% dengan realisasi kinerja 00,00%;

4. 3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

4. 4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

4. 5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari pimpinan puncak (kepala daerah) dan pimpinan internal BRIDA terhadap inovasi daerah
2. Fleksibilitas anggaran yang proporsional
3. Pengakuan eksternal pemda terhadap kebijakan dan capaian inovasi Pemerintah Kota Makassar

verifikasi

4. Dukungan lingkungan sekolah yang kompetitif terhadap kebijakan inovasi

Faktor Penghambat :

1. Adanya perubahan DPA Parsial sehingga menyebabkan perubahan atau penyesuaian time schedule pentahapan riset bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah;
2. Adanya pengusulan di DPA parsial perubahan kode rekening kegiatan penelitian sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan penelitian;
3. adanya penyesuaian jadwal dan tahapan sub kegiatan karena pergantian pejabat yang berwenang dalam hal pengesahan dasar pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut :

1. Melakukan penyesuaian time schedule pentahapan riset (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) untuk setiap kelompok riset bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah sesuai alur kas DPA Parsial;
2. Melakukan penyesuaian adminstrasi terkait perubahan pada DPA Parsial;
3. Melakukan perubahan jadwal dan tahapan sub keg serta administrasi pendukungnya dgn memperhatikan alokasi waktu yg ada.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, yang terbagi menjadi 7 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 128.626.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.590.000,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.590.000,- dengan presentase serapan anggaran sebesar 24,81% dan realisasi kinerja 50,00%.

verifikasi

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 100%.

1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.769.948.107,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.073.744.772,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 977.864.772,- dengan realisasi kinerja 72,22%;

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.380.000,- atau presentase sebesar 25,00% dengan realisasi kinerja 25,00%;

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- atau dengan prsentase serapan anggaran sebesar 22,45% dan realisasi kinerja 25,00%;

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan

verifikasi

realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 91.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan realisasi kinerja 25,00%;

4) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.251.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.466.910,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0%;

4.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

4.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.466.910,- dengan presentase realisasi sebesar 11,36% atau dengan realisasi kinerja 29,31%.

5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 140.014.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.074.689,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

verifikasi

5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.574.689,- atau dengan presentase serapan anggaran 19,42% dan realisasi kinerja 25,00%;

5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%

5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran 22,67% dan realisasi kinerja 25,00%.

6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 232.010.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.809.147,- Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.306.000,- atau dengan presentase serapan anggaran 11,96% dan realisasi kinerja 100%;

6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.003.147,- atau dengan persentase realisasi serapan anggaran 8,76% dan realisasi kinerja 6,67%;

6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja 21,43%,-.

verifikasi

Faktor pendorong :

Terciptanya kerja sama yang kuat antara pimpinan dan staf dalam menjembatani setiap pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat :

1. Anggaran kas untuk pelaksanaan beberapa kegiatan berada pada triwulan berikutnya.;
2. Kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan tahap pemindahan Kantor menyebabkan penundaan terhadap proses pencairan beberapa belanja pada Program Penunjang.

Tindak lanjut :

Melakukan penyesuaian pencairan belanja sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan.

Tabel 2.3 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BRIDA Kota Makassar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5.05					**RISET DAN INOVASI**									
5.05.	01.	2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	83,67%	90,00%	71,43%	79,37%	90,00%	86,84%	12.255.890.190
						Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	9.397.241.695
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%	87,97%	90,00%	90,90%	101,00%	90,00%	88,99%	1.600.710.987

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	49 Dokumen	30	10	10	100,00%	9	39	604.023.467
5.05.	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	7	3	3	100,00%	2	9	125.501.200
5.05.	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3	1	1	100,00%	1	4	28.934.950
5.05.	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3	1	1	100,00%	1	4	28.620.900
5.05.	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3	1	1	100,00%	1	4	29.983.750

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3	1	1	100,00%	1	4	29.183.300
5.05.	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6	1	1	100,00%	1	7	260.888.717
5.05.	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8	2	2	100,00%	4	12	100.910.650
5.05.	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	60 Bulan	36	12	12	100,00%	12	48	16.952.014.023
5.05.	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang	93	27	27	100,00%	36	129	15.352.479.098
5.05.	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	13	12	12	100,00%	1	14	676.385.500

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	36	12	12	100,00%	12	48	848.531.350
5.05.	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3	1	1	100,00%	1	4	35.169.575
5.05.	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	15 Laporan	39	18	18	100,00%	3	42	39.448.500
5.05.	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	60 Bulan	36	12	12	100,00%	12	48	1.608.348.273
5.05.	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235 Stel	95	0	0	0	0	95	61.080.000
5.05.	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	165	49	35	71,43%	8	173	1.547.268.273

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel	25 Jenis Pengelolaan	15	5	5	100,00%	3	18	2.591.593.377
5.05.	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 komponen	20	1	1	100,00%	0	20	3.250.000
5.05.	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 komponen	6	2	2	100,00%	2	8	250.863.500
5.05.	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	5	1	1	100,00%	0	5	45.421.000
5.05.	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 media	12	5	5	100,00%	7	19	721.935.000
5.05.	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163 kali	157	35	35	100,00%	32	189	1.570.123.877
5.05.	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	35 Unit	35	0	0	0	0	35	703.214.000

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	6	0	0	0	0	6	124.500.000
5.05.	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit	39	0	0	0	0	39	484.038.000
5.05.	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	0	0	0	0	1	89.676.000
5.05.	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	36	12	12	100,00%	12	48	349.404.245
5.05.	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Orang	3	0	0	0	0	3	10.800.000
5.05.	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	24	12	12	100,00%	12	36	101.952.245
5.05.	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis	9	2	1	50,00%	3	12	7.900.100
5.05.	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	24	12	12	100,00%	12	36	228.751.900

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	55 Paket	24	11	10	90,91%	10	34	897.496.987
5.05.	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	3	1	1	100,00%	1	4	153.264.100
5.05.	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	41	15	15	100,00%	15	56	434.031.887
5.05.	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	58	20	18	90,00%	10	68	42.591.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Orang	2	0	0	0	0	2	9.000.000
5.05.	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	4	1	1	100,00%	1	5	258.610.000
5,05	02.	2.			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	72%	85,00%	35,72%	42,02%	90%	80,95%	8.341.501.644
						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	3.797.900.636

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
						Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	90%	97%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	98,34%	1.634.278.786
						Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	90%	85%	89,29%	89,00%	99,68%	94,93%	89,88%	1.015.480.672
5.05.	02.	2.	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diselenggarakan	29 Rekomendasi	19	4	4	100,00%	3	3	3.797.900.636
5.05.	02.	2.	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Rekomendasi	4	1	1	100,00%	1	1	930.365.569

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05.	02.	2.	01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	1	0	0	0	0	0	159.904.786
5.05.	02.	2.	01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	3	0	0	0	0	0	438.140.262
5.05.	02.	2.	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	10 Laporan	6	2	2	100,00%	1	1	442.820.000
5.05.	02.	2.	01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksana peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	5	1	1	100,00%	1	1	1.826.670.020

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	15 Dokumen	15	3	3	100,00%	3	3	5.022.415.391
5.05	02	2	02	01	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5 Dokumen	7	1	1	100,00%	1	1	1.484.816.580
5.05	02	2	02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5 Dokumen	4	1	1	100,00%	1	1	902.900.890
5.05	02	2	02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	0	0	0	0	0	178.147.700
5.05	02	2	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	2	0	0	0	0	0	317.347.759
5.05	02	2	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Dokumen	5	1	1	100,00%	1	1	2.139.202.462

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	10 Dokumen	12	2	2	100,00%	2	2	3.319.086.253
5.05	02	2	03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Dokumen	4	1	1	100,00%	1	1	995.051.025
5.05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	2	0	0	0	0	0	510.938.135
5.05	02	2	03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 Dokumen	4	1	1	100,00%	1	1	854.388.783

verifikasi

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05	02	2	03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	0	0	0	0	0	449.426.900
5.05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	55 Dokumen	24	5	5	100,00%	5	5	3.895.771.458
5.05	02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	1	0	0	0	1	1	598.905.058
5.05	02	2	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	10 Dokumen	5	1	1	100,00%	1	1	1.015.480.672
5.05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	20 Dokumen	7	2	2	100,00%	1	1	562.871.124

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		TARGET	Rp.
5.05	02	2	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15 Laporan	10	2	2	100,00%	1	1	1.010.004.603
5.05	02	2	04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 Laporan	7	0	0	0	1	1	708.510.001

verifikasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BRIDA Kota Makassar

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut jabatan Fungsional dan Sekretariat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman dalam nilai pancasila.

Sedangkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan adminstrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kinerja pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Capaian kinerja yang telah diraih selama periode tersebut mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah.

Beberapa indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang menggembirakan, salah satunya adalah persentase kesediaan

laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah yang selalu mencapai 100% sepanjang periode tersebut. Ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan dan penyampaian laporan, serta mencerminkan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indikator lain yang menunjukkan kemajuan adalah persentase ASN yang memperoleh peningkatan kapasitas. Meskipun ada penurunan capaian pada 2020 yang hanya mencapai 71,43% dibandingkan dengan target 90%, capaian tersebut membaik di tahun-tahun berikutnya. Namun, meskipun ada perbaikan, perhatian lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan konsistensi kinerja di masa mendatang. Namun terdapat juga indikator yang memerlukan perhatian lebih, seperti indikator implementasi rencana kelitbangan yang hanya tercapai 35,27% pada tahun 2024, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab kegagalannya. Dengan demikian, meskipun ada tantangan pada beberapa aspek, secara keseluruhan kinerja pelayanan perangkat daerah di Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang positif dengan adanya perbaikan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 (TC.30)

Tabel 2.4 (T-C.30.)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025 (Tw.1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	80,00	82,50	85,00	88,00	79,85	N/A	100%	100%	Capaian Kinerja pada tahun 2024 adalah 79,85, dengan kategori BB
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pembangunan Potensi Unggulan Daerah	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	Capaian Kinerja pada tahun 2024 tidak ada dikarenakan merupakan indikator baru dan target periode renja pertama periode RJMD 2025-2029
3.	Presentase Presentase Kebujakan Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	Capaian Kinerja pada tahun 2024 tidak ada dikarenakan merupakan indikator baru dan target periode renja pertama periode RJMD 2025-2029

verifikasi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025 (Tw.1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.	Presentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	Capaian Kinerja pada tahun 2024 tidak ada dikarenakan merupakan indikator baru dan target periode renja pertama periode RJMD 2025-2029

Sumber : Renstra BRIDA Tahun 2025-2029

verifikasi

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BRIDA Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan masih perlu untuk diatasi serta diantisipasi.

A. Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah

Memperkuat kapasitas riset dan inovasi dengan membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Hal ini penting agar penelitian dan inovasi yang dilakukan dapat terencana dengan baik, memiliki dampak nyata, dan mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru.

B. Penyusunan Peta Jalan Pemajuan Iptek

BRIDA perlu segera menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Kota Makassar untuk memastikan bahwa riset dan inovasi terarah, terintegrasi dengan kebutuhan daerah, dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset dan Inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai pemangku kepentingan terkait riset dan inovasi, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset, agar dapat menciptakan sinergi dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

C. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Iptek

BRIDA perlu memfasilitasi pengelolaan sumber daya riset dan inovasi, termasuk anggaran, kelembagaan, dan SDM, agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi yang berkualitas, serta memanfaatkan hasil riset untuk pemecahan masalah daerah, termasuk dalam sektor ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis seperti perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, dan pengelolaan sampah. BRIDA dapat memfasilitasi kolaborasi riset yang fokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.

E. Pemantauan dan Evaluasi Riset dan Inovasi

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan riset dan inovasi di daerah, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan dan

verifikasi

memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

F. Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi Iptek

Membangun dan mengelola sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan riset dan inovasi, serta memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengakses data riset yang relevan.

G. Fasilitasi Kolaborasi Internasional dan Nasional

Memperkuat kerjasama riset dan inovasi dengan pihak internasional dan nasional, agar Kota Makassar dapat mengakses teknologi baru, pengetahuan, dan best practices yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di daerah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi BRIDA dalam menyusun kebijakan, melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan, maka riset dan inovasi di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai Pancasila.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyempurnaan Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Kota Mkassar Tahun 2026 yang dilakukan setelah mendapat masukan dari usulan dari berbagai pihak. Penyempurnaan Renja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 dilakukan dengan menyajikan penggabungan daftar kegiatan prioritas dan telaahan terhadap rancangan RKPD. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BRIDA dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BRIDA, serta pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (*output* dan *outcome*), serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk BRIDA.

Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5 (T.C 31) di bawah ini.

verifikasi

Tabel 2.5 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				**11.954.000.000**					**11.954.000.000**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.791.954.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.791.954.200	
		Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%			Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		
		Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%			Kota Makassar SKPD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	54.234.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	54.234.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.234.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.234.900	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.999.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.999.700	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	12 Bulan	7.619.685.720	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	12 Bulan	7.619.685.720	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 O/B	7.265.323.820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 O/B	7.265.323.820	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	253.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	253.800.000	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87.429.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87.429.200	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.481.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.481.900	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8.650.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8.650.800	
1.3	Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	336.000.000	Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	336.000.000	
1.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	336.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	336.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	105.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	105.000.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	33.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	33.000.000	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	72.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel	3 Jenis Pengelolaan	277.652.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel	5 Jenis Pengelolaan	277.652.000	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.073.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.073.800	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.178.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.178.200	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Paket	14.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Paket	14.400.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	240.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	240.000.000	
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	2 Unit	56.840.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7 Unit	56.840.000	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	56.158.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	21 Unit	56.158.600	
1.6.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengelolaan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	101.013.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengelolaan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	101.013.280	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	0	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.134.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.134.300	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.878.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.878.900	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	11 Paket	242.210.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	11 Paket	242.210.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	159.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	159.930.000	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.300.000	
1.8.4	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.600.000	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.	Program Riset dan Inovasi Daerah		Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	100%	3.162.045.800	Program Riset dan Inovasi Daerah		Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	100%	3.162.045.800	
2.1.	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan berbasis bukti dalam permasalahan daerah	21 Rekomendasi	1.932.685.800	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan berbasis bukti dalam permasalahan daerah	6 Rekomendasi	1.932.685.800	
2.1.1	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	245.853.300	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	245.853.300	
2.2.2	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Kota Makassar SKPD	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	576.654.100	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Kota Makassar SKPD	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	576.654.100	
2.2.3	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian,pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	40 Laporan	893.825.900	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian,pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	40 Laporan	893.825.900	
2.2.4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	36.090.300	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	36.090.300	
2.2.5	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	180.262.200	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	180.262.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.2.6	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	0	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	0	
2.2.	Invensi dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah hasil invensi dan inovasi yang dihasilkan	110 Produk	1.229.360.000	Invensi dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah hasil invensi dan inovasi yang dihasilkan		1.229.360.000	
2.2.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	153.894.100	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	153.894.100	
2.2.2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	75.621.000	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	75.621.000	
2.2.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	49.995.000	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	49.995.000	
2.2.4	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan	58.285.000	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan	58.285.000	
2.2.5	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	4 Kegiatan	384.701.000	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	4 Kegiatan	384.701.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.2.6	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3 Laporan	128.242.400	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3 Laporan	128.242.400	
2.2.7	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	143.769.600	Penyusunan kebijakan di bidanginvensi dan inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	143.769.600	
2.2.8	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 laporan	199.993.100	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 laporan	199.993.100	
2.2.9	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	1 Laporan	34.854.800	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	1 Laporan	34.854.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah Kota Makassar dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang ditujukan kepada BRIDA Kota Makassar belum ada. Atau dengan kata lain, sampai saat ini, usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan berasal dari hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat lewat Musrenbang yang ditujukan kepada BRIDA Kota Makassar belum ada.

Tabel 2.4 (T-C.32.)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Makassar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada BRIDA Kota Makassar berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2026, tidak terdapat usulan masyarakat untuk BRIDA Kota Makassar.

verifikasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada level Nasional kebijakan Nasional telah mengalami berbagai perubahan dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dimana salah satu tugas nya adalah untuk mengintegrasikan Lembaga-lembaga riset pemerintah kedalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ,mengelola dan mengembangkan riset serta inovasi nasional dan meningkatkan kaloborasi antara pemerintah, industry, dan akademisi dalam bidang riset dan inovasi.

BRIN menargetkan pengembangan riset dalam beberapa bidang strategis, antara lain teknologi digital dan kecerdasan buatan, Kesehatan dan bioteknologi, energi terbarukan dan ketahanan pangan, dan teknologi pertahanan dan antaraiksa.

Dalam hal pendanaan Pemerintah menetapkan Dana Abadi Penelitian untuk mendukung riset jangka Panjang, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas sebagai institusi penelitian dan pengembangan, BRIDA Kota Makassar antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang penelitian maupun tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang penelitian pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti mengadakan koordinasi, melaksanakan FGD, melakukan penelitian yang bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian, baik universitas maupun instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan kelitbangan guna menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan maupun naskah akademik.

BRIDA Kota Makassar juga melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya serta berperan dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar yang diharapkan dapat termanfaatkan bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain mengatur tentang tugas dan

struktur BRIN, Perpres tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi di tingkat daerah yang disebut dengan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah). BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan oleh BRIN sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Pembentukan BRIDA tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Kebijakan tersebut tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BRIDA Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset kebijakan sebagai landasan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar

Tujuan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar 2025-2029 dirumuskan dengan mengacu pada Misi Kempat RPJMD Kota Makassar 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata memalaui penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni dan budaya lokal. Sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Kota Makassar 2025-2029, tujuan Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah " **Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah".**

Tujuan ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi Kota Makassar sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, yang berfokus pada pembangunan ekosistem riset dan inovasi berbasis digital. Oleh karena itu, BRIDA berperan penting dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berbasis digital untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif. Dengan demikian, BRIDA mendukung penerapan riset dan inovasi dalam sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, pariwisata berkelanjutan, kemaritiman, dan pengelolaan sumber daya alam, yang menjadi prioritas dalam

pembangunan ekonomi Kota Makassar.

Oleh karena itu, BRIDA Kota Makassar kemudian menetapkan sasaran kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah

Selain dua sasaran tersebut, sasaran yang dapat mendukung penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota juga perlu diperhatikan. Sasaran-sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator. Dari rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, telah ditetapkan sasaran seperti diuraikan di atas. Maka dari itu, untuk menjelaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan diwujudkan oleh BRIDA Kota Makassar selama 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja (Renja) BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 serta Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dari rumusan strategi yang diuraikan diatas, maka ditetapkan Arah kebijakan BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 atau dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang pembangunan daerah.
3. Melakukan riset riset dengan durasi singkat untuk mendukung keijakan kebijaka diskresi pimpinan.
4. Melakukan *coaching* berkesinambungan kepada inovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.

5. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur.
6. Melakukan Pelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu.
7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara terperinci, uraian garis besar rumusan rencana program dan kegiatan yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN (OUTPUT). INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.05.					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				11.954.000.000	PAD			**11.768.772.000**
5.05.	01	2			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**8.791.954.200**	PAD		**100 %**	8.806.719.300
						Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	**100 %**		PAD		**100 %**	
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Makassar SKPD	**90 %**		PAD		**90 %**	
5.05.	01	2	01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan. Penganggaran. dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**54.234.600**	PAD		**100 %**	**68.999.700**
5.05.	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	2 Dokumen	21.234.900	PAD		2 Dokumen	40.000.000
5.05.	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Dokumen	4.000.000	PAD		1 Dokumen	4.000.000
5.05.	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Dokumen	4.000.000	PAD		1 Dokumen	4.000.000
5.05.	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Dokumen	4.000.000	PAD		1 Dokumen	4.000.000
5.05.	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Dokumen	4.000.000	PAD		1 Dokumen	4.000.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN (OUTPUT). INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
5.05.	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	4.000.000	PAD		0 Laporan	0
5.05.	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	4 Laporan	12.999.700	PAD		4 Laporan	12.999.700
5.05.	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**7.619.685.720**	PAD		**100 %**	**7.619.685.720**
5.05.	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	53 Orang/bulan	7.265.323.820	PAD		53 Orang/bulan	7.265.323.820
5.05.	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar SKPD	1 Dokumen	253.800.000	PAD		1 Dokumen	253.800.000
5.05.	01	2	02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	12 Dokumen	87.429.200	PAD		12 Dokumen	87.429.200
5.05.	01	2	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	4.481.900	PAD		1 Laporan	4.481.900
5.05.	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	3 Laporan	8.650.800	PAD		3 Laporan	8.650.800
5.05.	01	2	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**336.000.000**	PAD		**100 %**	**336.000.000**
5.05.	01	2	03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	336.000.000	PAD		1 Laporan	336.000.000
5.05.	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**105.000.000**	PAD		**100 %**	**105.000.000**
5.05.	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar SKPD	1 Paket	33.000.000	PAD		1 Paket	33.000.000

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
5.05.	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar SKPD	6 Orang	72.000.000	PAD		6 Orang	72.000.000
5.05.	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**277.652.000**	PAD		**100 %**	**277.652.000**
5.05.	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Paket	2.073.800	PAD		1 Paket	2.073.800
5.05.	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Paket	10.000.000	PAD		1 Paket	10.000.000
5.05.	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Paket	11.178.200	PAD		1 Paket	11.178.200
5.05.	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	5 Dokumen	14.400.000	PAD		5 Dokumen	14.400.000
5.05.	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	47 Laporan	240.000.000	PAD		30 Laporan	240.000.000
5.05.	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**56.840.000**	PAD		**100 %**	**56.158.600**
5.05.	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	4 Unit	56.158.600	PAD		5 Unit	56.158.600
5.05.	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**101.013.280**	PAD		**100 %**	**101.013.280**
5.05.	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	39.000.000	PAD		1 Laporan	39.000.000
5.05.	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	2.134.300	PAD		1 Laporan	2.134.300

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN (OUTPUT). INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
5.05.	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	59.878.900	PAD		1 Laporan	59.878.980
5.05.	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**242.210.000**	PAD		**100 %**	**242.210.000**
5.05.	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar SKPD	1 Unit	44.380.000	PAD		1 Unit	44.380.000
5.05.	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar SKPD	15 Unit	159.930.000	PAD		15 Unit	159.930.000
5.05.	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar SKPD	10 Unit	7.300.000	PAD		9 Unit	7.300.000
5.05.	01	2	09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar SKPD	1 Unit	30.600.000	PAD		1 Unit	30.600.000
5.05	**03.**	**2.**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan**		**100 %**	**3.162.045.800**	PAD		**100 %**	**2.962.052.700**
5.05.	**03.**	**2.**	**01**		**Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan**	**Persentase Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Yang Terlaksana**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**1.932.685.800**	PAD		**100 %**	**1.932.685.800**
5.05.	03.	2.	01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian. pengembangan. pengkajian. dan penerapan	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	245.853.300	PAD		3 Laporan	245.853.300
5.05.	03.	2.	01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Kota Makassar SKPD	3 Naskah	576.654.100	PAD		1 Naskah	576.654.100
5.05.	03.	2.	01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian. pengembangan. pengkajian. dan penerapan	Kota Makassar SKPD	10 Laporan	893.825.900	PAD		10 Laporan	893.825.900

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
5.05.	03.	2.	01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	36.090.300	PAD		1 Laporan	36.090.300
5.05.	03.	2.	01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Makassar SKPD	2 Pelatihan	180.262.200	PAD		2 Pelatihan	180.262.200
5.05.	**03**	**2**	**02**		**Invensi dan Inovasi**	**Persentase Invensi dan Inovasi Yang Terlaksana**	Kota Makassar SKPD	**100 %**	**1.229.360.000**	PAD		**100 %**	**1.029.366.900**
5.05.	03	2	02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	153.894.100	PAD		1 Laporan	153.894.100
5.05.	03	2	02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	75.621.000	PAD		1 Laporan	75.621.000
5.05.	03	2	02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	49.995.000	PAD		1 Laporan	49.995.000
5.05.	03	2	02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	58.285.000	PAD		1 Laporan	58.285.000
5.05.	03	2	02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembagapusatorganisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kota Makassar SKPD	3 Kegiatan	384.701.000	PAD		3 Kegiatan	384.701.000
5.05.	03	2	02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	128.242.400	PAD		1 Laporan	128.242.400
5.05.	03	2	02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Kota Makassar SKPD	1 Naskah	143.769.600	PAD		1 Naskah	143.769.600
5.05.	03	2	02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	199.993.100	PAD		0 Laporan	0

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN (OUTPUT). INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
5.05.	03	2	02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Kota Makassar SKPD	1 Laporan	34.854.800	PAD		1 Laporan	34.858.800

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar didasarkan pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, RKPD Kota Makassar dan Renstra BRIDA Kota Makassar. Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2026 mencakup 2 Program, 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**
   a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

verifikasi

Perundangundangan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   d. PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program Riset dan Inovasi Daerah.

1. **Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan.**
   a. Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan.
   b. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset.
   c. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan.
   d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan.
   e. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan.
2. **Invensi dan Inovasi**
   a. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah.
   b. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
   c. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi.
   d. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi.
   e. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian

verifikasi

kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembagapusatorganisasi penelitian lainnya di daerah.

f. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi.
g. Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi.
h. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah.
i. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset.

Secara keseluruhan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dirincikan ke dalam Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang bersumber dari aplikasi SIPD RI sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Badan Riset dan Inovasi Daerah						**11,954,000,000.0**							**11,768,772,000.0**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11,954,000,000.0**							**11,768,772,000.0**	
	5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**11,954,000,000.0**							**11,768,772,000.0**	
	5 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**8,791,954,200.0**						**100 %**	**8,806,719,300.0**	
		Outcome :Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**							**100 %**		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**90 %**	**90%**	**90 %**	**90 %**							**90 %**		
	5 05 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**54,234,600.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**68,999,700.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21,234,900.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	4,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	0.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12,999,700.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	12,999,700.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7,619,685,720.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**7,619,685,720.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7,265,323,820.0	Kota Makassar	DAU			Perangkat Daerah	53 Orang/bulan	7,265,323,820.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	253,800,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Dokumen	253,800,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	87,429,200.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	87,429,200.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,481,900.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	4,481,900.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8,650,800.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	8,650,800.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**336,000,000.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**336,000,000.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	336,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	336,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**105,000,000.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**105,000,000.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	33,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	33,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	49 Orang	8 Orang	6 Orang	72,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	6 Orang	72,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**277,652,000.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**277,652,000.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	2,073,800.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	2,073,800.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	10,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11,178,200.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	11,178,200.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14,400,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Dokumen	14,400,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167 Laporan	35 Laporan	11 Laporan	47 Laporan	240,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	30 Laporan	240,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**100 %**	**56,158,600.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**56,158,600.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit	56,158,600.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	5 Unit	56,158,600.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**101,013,280.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**101,013,280.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39,000,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	39,000,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,134,300.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	2,134,300.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59,878,980.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	59,878,980.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**242,210,000.0**					**Perangkat Daerah**	**100 %**	**242,210,000.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44,380,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	44,380,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	159,930,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	15 Unit	159,930,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	18 Unit	10 Unit	10 Unit	7,300,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	9 Unit	7,300,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	01	2.09	0010	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30,600,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	30,600,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**03**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** ***Outcome :Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah***	**Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan**	**100 %**	**N/A**	**100 %**	**100 %**	**3,162,045,800.0**				**(PD 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan** **(PD 5) Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal**		**100 %**	**2,962,052,700.0**	
	5	**05**	**03**	**2.01**		**Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan**	**Persentase Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1,932,685,800.0**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1,932,685,800.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	11 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	245,853,300.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Laporan	245,853,300.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	7 Naskah	0 Naskah	0 Naskah	3 Naskah	576,654,100.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Naskah	576,654,100.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	893,825,900.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	10 Laporan	893,825,900.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	36,090,300.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	36,090,300.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	10 Pelatihan	0 Pelatihan	0 Pelatihan	2 Pelatihan	180,262,200.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	2 Pelatihan	180,262,200.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**	**03**	**2.02**		**Invensi dan Inovasi**	**Persentase Invensi dan Inovasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1,229,360,000.0**					**Masyarakat di wilayah Kota Makassar**	**100 %**	**1,029,366,900.0**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	153,894,100.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	153,894,100.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	75,621,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	75,621,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	49,995,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	49,995,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	58,285,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	58,285,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembagapusatorganisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	15 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	384,701,000.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	3 Kegiatan	384,701,000.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	128,242,400.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	128,242,400.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	5 Naskah	0 Naskah	0 Naskah	1 Naskah	143,769,600.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Naskah	143,769,600.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	199,993,100.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	0 Laporan	0.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	34,858,800.0	Kota Makassar	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Masyarakat di wilayah Kota Makassar	1 Laporan	34,858,800.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
						JUMLAH						11,954,000,000.0							11,768,772,000.0	

BAB V
PENUTUP

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), maka BRIDA Kota Makassar bertransformasi menjadi BRIDA pada tahun 2025 mengarahkan Rencana Kerja tahun 2026 yang dapat mendukung penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagai peran dari BRIDA. BRIDA sebagai perangkat daerah mandiri menjadi sentral dalam seluruh kegiatan kelitbangan dan inovasi di Kota Makassar kedepannya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan program, kegiatan, dan alokasi dana yang mendukung pelaksanaan kelitbangan dan inovasi tersebut. Alokasi anggaran pada Rancangan Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 adalah sebesar **Rp 11.954.000.000,- *(Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)*** Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi ataupun melebihi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 tersebut, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung program prioritas Wali Kota Makassar. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026, antara lain :

a. Dalam penyusunan Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan setiap program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2026 dan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025.
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
c. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192).

1.1 Rencana Tindak Lanjut

Fungsi BRIDA Kota Makassar sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah akan melakukan kajian untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan dalam

verifikasi

perencanaan pembangunan Kota Makassar, membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur fungsional untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur fungsional.
b. Memberdayakan aparatur fungsional yang dimiliki BRIDA Kota Makassar untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga penelitian pemerintah agar pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan serta menghasilkan suatu rekomendasi dan inovasi untuk pembangunan Kota Makassar.
c. Dalam rangka sinergitas penelitian harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu jadwal yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja BRIDA Kota Makassar Tahun 2026 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 3 September 2025

PLT. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

H. Haidil Adha, S.Sos, M.M
NIP. 19700216 1999803 1 004

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

[0411]—3616940

makassarkota.go.id